



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2005

**POLA PEMANFAATAN KREDIT USAHA DI KALANGAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PAGUYUBAN GOTONG
ROYONG DI KOTA SURABAYA**

Oleh:

**Karnaji, S.Sos.
Dra. Sutinah, M.S.
Drs. Sudarso, M.Si.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005

Nomor Urut : 41

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2005

- COMMERCIAL IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- TRAVELLING SALES PERSONEL



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2005

POLA PEMANFAATAN KREDIT USAHA DI KALANGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PAGUYUBAN GOTONG ROYONG DI KOTA SURABAYA

KRB
KK-2
Lp 04/08
Kor
P

Oleh:
Karnaji, S.Sos.
Dra. Sutinah, M.S.
Drs. Sudarso, M.Si.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005
Nomor Urut : 41

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November, 2005



LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

1. a. Judul Penelitian : **POLA PEMANFAATAN KREDIT USAHA DI KALANGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PAGUYUBAN GOTONG ROYONG THR DI KOTA SURABAYA**
- b. Kategori : I/II/III
2. Ketua Peneliti
1. Nama : Karnaji, S.sos., M.Si
 2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 3. Pangkat/Golongan/NIP : Penata /IIC/132 162 037
 4. Jabatan Fungsional : Lektor
 5. Fakultas/Puslit/Jurusan : FISIP/Lemlit/Sosiologi
 6. Universitas : Universitas Airlangga
 7. Bidang Ilmu yang Diteliti: Ilmu Sosial
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 orang
4. Lokasi Penelitian : Kota Surabaya
5. Kerjasama dengan instansi lain: Tidak ada
6. Masa Penelitian : 6 bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah)

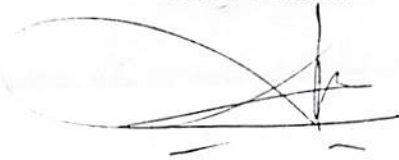
Mengetahui

Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Herman Siahaan
NIP. 130 701 134

Ketua Peneliti



Karnaji, S.sos., M.Si
NIP 132162037

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unair,



Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
NIP. 130 701 125

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

POLA PEMANFAATAN KREDIT USAHA DI KALANGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PAGUYUBAN GOTONG ROYONG THR DI KOTA Surabaya (Karnaji, Dra. Sutinah dan Sudarso, 2005, 59 halaman)

Permasalahan yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merima kredit? (2) Bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL)? (3) Bagaimanakah gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)?

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merima kredit. Termasuk di dalamnya mengetahui usaha macam apa yang ditekuni oleh kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) penerima kredit. (2) Mengetahui bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL). Termasuk di sini apakah kredit yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan produktif ataukah justru dimanfaatkan untuk keperluan yang konsumtif. (3) Mengetahui bagaimana gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Lokasi penelitian ini di Taman Hiburan Rakyat (THR) kota Surabaya. Jumlah sampel direncanakan sebanyak 50 responden. Semua responden akan dipilih dengan menggunakan teknik *systematic random* sampling. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: melakukan wawancara langsung kepada responden terpilih. Selain itu juga, mengumpulkan data sekunder dan melakukan observasi langsung terhadap lokasi di mana PKL melakukan aktivitasnya. Data yang diperoleh akan diolah terutama dengan analisis kualitatif, yaitu menyajikan data secara terinci sehingga dapat diperoleh suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai

Beberapa kesimpulan dari temuan-temuan lapangan adalah dari 50 PKL yang terjaring sebagai responden penelitian ini, hanya 6% yang mengaku masih lajang. Sedangkan sisanya sebanyak 84% umumnya mengaku sudah menikah, dan bahkan 10% di antaranya sudah berstatus duda atau janda.

Sebanyak 94% mengaku mereka saat ini telah memiliki anak, bahkan sebagian besar responden mengaku memiliki anak lebih dari 3 orang. Ada 4% responden mengaku memiliki anak lebih dari 5 orang. Tingkat pendidikan responden adalah 14% tidak sekolah, 24% tamat SD, 36% Tamat SLTP, sebesar 22% adalah tamat SLTA dan 4% lulusan perguruan tinggi.

Dari segi jenis barang dagangan, terdapat sebesar 10% berjualan makanan/minuman, 6% berjualan VCD, 40% berjualan jenis pakaian, 20% berjualan sepatu, 4% berjualan ikat pinggang, 8% berjualan sepatu/sandal, 8% berjualan accessories dan sebesar 4% berjualan buah.

Pola pemanfaatan bantuan modal usaha justru lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Hanya terdapat sebesar 14% yang betul-betul digunakan untuk kegiatan produktif. Sementara itu responden yang menggunakan sebagian besar dan seluruhnya dari dana bantuan modal untuk kegiatan konsumtif mencapai sebesar 46%. Bagi responden yang terlanjur mempergunakannya untuk kegiatan konsumtif sebagian besar (72%) menyatakan tidak akan menggantinya. Artinya tidak akan mempergunakan dana bantuan modal untuk kegiatan yang bersifat produktif. Karena itu terdapat sebesar 36% yang mengatakan bahwa bantuan modal yang diterima tidak membantu usaha berjualannya yang ditekuninya.

Untuk mendapatkan bantuan modal usaha pedagang hanya cukup dengan meminjamkan beberapa saat Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pengurus paguyuban. Bantuan modal usaha langsung diserahkan ke kelompok Paguyuban PKL, maka dapat dimengerti jika di mata responden kucuran dana hingga dapat diterima tidak mengalami keterlambatan. Dari 50 responden yang diwawancarai,

terdapat sebanyak 68% yang mengaku telah mengangsur melalui ketua pengurus paguyuban.

Berdasarkan temuan lapangan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang kompeten terhadap penataan PKL khususnya di lingkungan THR dan di kota Surabaya pada umumnya. Kebijakan apapun harus mendasarkan pada fakta riil di lapangan, bukan hanya sekedar mendasarkan pada Perda semata. Tidak menutup kemungkinan Perda yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada.

Perlu adanya konsistensi dan tidak setengah-setengah dalam menata PKL termasuk di dalamnya pemberian bantuan modal usaha. Studi ini menemukan bahwa bantuan modal diberikan hanya sekali tanpa ada kontrol, mekanisme yang jelas dan evaluasi serta kelanjutannya. Akhirnya bantuan modal tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bantuan modal usaha akhirnya diperlakukan sebagai rejeki nomplok tanpa ada keharusan mengembalikan dan bebas dipergunakan apa saja bukan sebagai modal produktif.

(Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga,; DIP Kontrak Nomor: 729/J03/PG//2005 Dirjen Dikti, Depdiknas)

kata kunci = kredit usaha ; PKL (Pedagang kaki lima)

SUMMARY OF RESEARCH

Useful Pattern of Business Credit on PKL Paguyuban Gotong Royong THR in Surabaya (Karnaji, Sutinah, and Sudarso, 2005, 59 pages)

The problems that would like to answer in this research are (1) how the characteristic of social-economy of PKL that accept the credit? (2) How the useful pattern of credit that accepted by PKL? (3) How the picture of the credit mechanism that gives to PKL?

The aims of this research are (1) to know the characteristic of social-economy of PKL that accept the credit, including their business. (2) to know how the useful pattern of credit accepted by them. It is use for the sake of production or for consumptive one. (3) to know how the picture of credit mechanism that give to them.

The location of this research is on Taman Hiburan Rakyat (THR) in Surabaya. The planned number of sample is 50 respondents. All respondents will select by using *systematic random sampling*. Data that needed for this research collected by doing direct interview with them. Besides that, we also collect secondary data and make direct observation on the spot. The data will manage with qualitative analysis, that is, presents detail data so that gain the proper explanation and conclusion.

There are some difficulties found in the field. From 50 PKL as respondents in this research only 6% that single, while the rest, 84%, generally married, and 10% is widow and widower.

Ninety-four percent confess they now have children; even part of them has children more than 3 child. Four percent confess have more five children. The level of education of respondents is 14% not going to school, 24% passed the elementary school, 36% passed junior high school, 22% is passed senior high school, and 4% passed the university.

From merchandize point of view, 10% sale food/beverage, 6% sale VCD, 40% clothes, 20% shoes, 4% belt, 8% shoes/sandal, 8% accessories, and 4% sale fruit.

The pattern of business useful is used for consumptive activity. Only 14% that actually use for productive activity. Respondents that use part or all of that credit for consumptive activity reached 46%. For almost all respondents (72%) that using the fund for consumptive activity, they states not to compensate it. It means that the fund not for productivity. For that reason, 36% say that the fund not help their business.

To get the credit, they only lend their ID card toward the leader of paguyuban (group). Credit submits to the group of Paguyuban PKL; therefore, it can be understood if in the eyes of respondents the fund is always on time. Of 50 interviewed respondents, 68% confess that they install through the leader of paguyuban.

Based on the field finding, there are some suggestions that can give to the competence bodies about the management of PKL, especially in THR and, in general, Surabaya. Any policy shall base on the real fact, not only just depend on the Perda. Possibly, the existence Perda is not appropriate again with the development.

It is need a consistency and all out action when managing PKL, including the credit that given. This study found that the credit gives once without control, clear mechanism, evaluation, and follow-up. Therefore, credits not make a maximal result. At last, this credit is assumed as sustenance without liability to turn it and free to use it not as a productive capital.

Kata Pengantar

Permasalahan yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menerima kredit? (2) Bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL)? (3) Bagaimanakah gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)?

Penelitian ini menemukan bahwa pola pemanfaatan bantuan modal usaha justru lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Bagi responden yang terlanjur mempergunakannya untuk kegiatan konsumtif sebagian besar menyatakan tidak akan menggantinya. Artinya tidak akan mempergunakan dana bantuan modal untuk kegiatan yang bersifat produktif.

Karena itu perlu adanya konsistensi dan tidak setengah-setengah dalam menata PKL termasuk di dalamnya pemberian bantuan modal usaha. Penelitian ini menemukan bahwa bantuan modal diberikan hanya sekali tanpa ada kontrol, mekanisme yang jelas dan evaluasi serta kelanjutannya. Akhirnya bantuan modal tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bantuan modal usaha akhirnya diperlakukan sebagai rejeki nomplok tanpa ada keharusan mengembalikan dan bebas dipergunakan apa saja bukan sebagai modal produktif.

Proses penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Karena itu patut kiranya disebut dan diberi ucapan terimakasih, kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
3. PKL yang menjadi responden penelitian ini.
4. Para mahasiswa sosiologi yang dengan tekun dan bertanggungjawab membantu mengumpulkan data lapangan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna dan memberikan sumbangan sekaligus memperkaya penelitian anak-anak jalanan khususnya di Surabaya.

20 Oktober 2005

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	
RINGKASAN DAN SUMMARY.....	i
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	20
BAB IV METODE PENELITIAN	21
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	24
1. Profil Sosial PKL.....	32
2. Pemanfaatan Kredit.....	39
3. Proses Permohonan, Pencairan dan Pengembalian KUT.....	45
BAB VI Kesimpulan dan Saran.....	53
1. Kesimpulan.....	53
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
Lampiran	
- Personalia Tenaga Peneliti	
- Kuesioner Penelitian	

DAFTAR TABEL

1.	Status Perkawinan.....	32
2.	Umur Responden.....	33
3.	Jenis Kelamin.....	35
4.	Tingkat Pendidikan.....	36
5.	Jenis Dagangan.....	37
6.	Besar Bantaun Modal yang Diterima.....	40
7.	Kesesuaian antara Permohonan Dengan yang Diterima.....	41
8.	Pola Pemanfaatan Bantuan Kredit Usaha.....	41
9.	Apakah Bantuan Modal Usaha Bagi yang Terlanjur Dipakai untuk Keperluan Lain.....	43
10.	Bantuan Modal Usaha Dapat Membantu Memperbesar Usaha.....	44
11.	Keterlambatan Penerimaan Kredit Bantuan Modal Usaha.....	48
12.	Cara Responden Membayar Cicilan Bantuan Modal Usaha.....	49

Bab I

Pendahuluan

1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan kota yang masih sulit diatasi adalah semakin meningkatnya kuantitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya. Memang data pasti berapa jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di kota Surabaya belum ada, karena tidak tercatat secara resmi. Tetapi peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dengan mudah dirasakan dan dilihat. Apalagi pasca Indonesia dilanda krisis berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, di berbagai sudut jalan bermunculan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Di Surabaya, menurut data Bagian Perekonomian Pemkot, saat ini jumlah PKL yang ada diperkirakan telah mencapai 70 ribu orang lebih. Padahal, daya tampung daerah-daerah strategis yang ada di kota dikalkulasi hanya sekitar 5-10 ribu PKL. Ini berarti telah terjadi kelebihan PKL hingga puluhan kali lipat, sehingga wajar jika kemudian berdampak buruk bagi banyak pihak. Di tempat-tempat PKL biasa mangkal, lalu lintas acapkali macet dan semrawut, kegiatan usaha lain juga terganggu karena di depan tempat usahanya dipenuhi PKL, dan persaingan di antara para PKL sendiri juga makin tidak sehat karena jumlahnya makin banyak. Di kawasan jalan Pahlawan, misalnya kehadiran PKL nyaris memakan separuh lebih badan jalan, sehingga sangat mengganggu ketertiban



lalu-lintas. Hal yang sama juga bisa dilihat di jalan Kapasari yang setiap hari macet karena jalan-jalan dipenuhi PKL yang menggelar dagangannya di jalan.

Semakin tumbuh dan berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang cenderung banyak menguasai ruang-ruang publik sehingga dianggap merugikan orang lain mengilhami pemerintah kota harus memutar otak untuk melakukan tindakan antisipati dan kuratifnya. Telah banyak keluhan masyarakat yang menganggap bahwa akibat semakin tidak teraturnya para Pedagang Kaki Lima (PKL). Semakin banyaknya PKL yang tidak teratur berdampak dan andil dalam semakin memperparah kemacetan. Selain itu dari segi keindahan kota keberadaan PKL seringkali dituduh merusak pemandangan. Pemandangan yang kumuh dan kotor di sepanjang trotoar yang digunakan untuk berjualan serta rombongan-rombong yang kusam tak teratur semakin menambah tak sedap ruang-ruang publik di pinggir-pinggir jalan.

Keinformalan berbagai jenis pekerjaan di perkotaan terus berkembang seringkali melewati batas-batas peraturan yang ditetapkan pemerintah kota. Di tengah keterbatasan aparat pemerintah kota sejumlah kreasi penduduk kota tak jarang menimbulkan berbagai persoalan lanjutan yang tak kalah rumitnya. Penduduk kota yang menciptakan pekerjaan dengan memasuki sektor informal seperti PKL membawa dampak saling berebut ruang-ruang terbuka yang diperuntukkan untuk fasilitas publik. Berbagai lokasi seperti misalnya trotoar yang semula dibangun dimaksudkan bagi pejalan kaki akhirnya ditumbuhi PKL. Demikian juga jalan-jalan akhirnya menjadi "korban" sebagai pasar yang tidak

hanya bersifat dadakan. Beberapa ruas jalan di kota Surabaya seperti Pahlawan atau Kapasari akhirnya di penuh oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintah kota sebagai institusi yang memiliki kewenangan mengatur kota mau tidak mau harus turun tangan. Kecenderungan seperti itu kalau dibiarkan tanpa adanya intervensi regulasi dari pemerintah kota akan beresiko dan harus dibayar dengan biaya yang tidak murah. Biaya sosial maupun ekonomi di kelak kemudian hari jika dibiarkan berkembang secara "alami" tak menutup kemungkinan semakin menambah kerawanan kawasan kota. Sejumlah pengalaman menunjukkan bahwa sebuah tempat yang dibiarkan dari serbuan kaum migran akan membentuk perkampungan kumuh atau *slum area*. Dalam perkembangannya perkampungan kumuh yang bermunculan sedikit banyak akan menimbulkan persoalan bagi perkembangan kota.

Karena itu di berbagai sudut kota, nyaris tidak ada ruang yang steril dari rombongan, gelaran tikar dan berbagai alat peraga dagang PKL, dan bahkan ada kesan jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah. Lantas: kebijakan macam apakah sebenarnya yang harus dikembangkan oleh sebuah kota metropolitan seperti Surabaya agar dapat menata sektor informal dengan bijak —tanpa harus mengorbankan kepentingan keamanan, ketertiban dan keindahan kota secara keseluruhan?

Terlepas, apakah Perda PKL itu bakal direvisi atau tidak, tetapi yang jelas untuk menata dan menertibkan PKL yang jumlahnya sudah terlanjur merebak harus diakui bukanlah hal yang mudah. Untuk jangka pendek, mungkin benar

bahwa jalan-jalan protokol dan tempat-tempat yang strategis biasanya dapat ditertibkan melalui kebijakan kota yang sifatnya *punitif* (menghukum) dan represif terhadap golongan masyarakat miskin dan sektor informal kota. Seperti bisa kita lihat selama ini, ketika Satpol PP gencar menggelar berbagai operasi penertiban, segera bisa dirasakan bagaimana beberapa kawasan dan jalan protokol kota segera tampak bersih dan tertib untuk sementara waktu.

Tetapi, apakah model penataan kota yang semata hanya mengandalkan kepada kekuatan petugas penertiban dapat menjamin bahwa para pekerja di sektor informal, khususnya PKL, tidak kembali di lokasi yang sama di kemudian hari? Sejauhmana efektivitas berbagai kegiatan penertiban yang dilakukan jika di saat yang sama tidak dibarengi dengan program-program penanganan lain yang menunjang upaya-upaya penertiban yang dilakukan aparat Satpol PP? Tentu saja, Pemerintah Kota Surabaya tidak semata-mata ingin menghapus dan menggusur PKL begitu saja, tetapi yang dilakukan adalah mencoba menawarkan sejumlah alternatif penyelesaian yang saling menguntungkan.

Salah satu kebijakan yang ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pemberian kredit modal. Program ini memang sangat terbatas, jika dilihat baik dari segi jumlah modal yang diberikan kepada PKL maupun jumlah jumlah PKL yang menerimanya. Kredit untuk PKL dikururkan pada tahun 2003 untuk sepuluh kelompok PKL eks Taman Surya, yang kini direlokasi ke Taman Hiburan Rakyat (THR), dengan total dana Rp 300 juta. Anggaran yang dikururkan itu merupakan total anggaran yang dialokasikan untuk mendorong perkembangan

sektor informal, khususnya PKL. Kredit sebesar itu diberikan kepada sepuluh kelompok PKL "Gotong Royong" THR. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 15 PKL. Uang pinjaman tersebut dikenai bunga delapan persen setahun. Selama empat bulan pertama, mereka dibebaskan dari kewajiban membayar kredit melalui Bank Jatim.

Studi ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kredit yang diberikan PKL telah memberi manfaat bagi. Selain untuk mengetahui manfaat dari pemberian kredit bagi PKL, studi ini juga ingin mengetahui bagaimana pola pemanfaatan dari kredit yang diterimanya. Apakah telah dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian kredit tersebut, yaitu untuk kebutuhan yang bersifat produktif ataukah justru dipergunakan untuk keperluan konsumtif.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merima kredit? Termasuk di dalamnya usaha macam apa yang ditekuni oleh kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) penerima kredit?
2. Bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL)? Termasuk di sini apakah kredit yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan produktif ataukah justru dimanfaatkan untuk keperluan yang konsumtif?
3. Bagaimanakah gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)? Termasuk di sini bagaimanakah

proses pencairan dan pembayaran cicilan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL)?***

Bab II

Tinjauan Pustaka

Kebijakan pemerintah kota terhadap kalangan miskin kota menurut David Baker (1980) paling tidak ada tiga pendekatan besar. *Pertama*, pendekatan yang bersifat punitif atau menghukum. Dan sebaliknya tidak berniat melakukan upaya apapun untuk mengubah dan memperbaiki sektor-sektor termiskin tetapi justru berusaha menyingkirkan kalangan miskin secara fisik dari pemandangan umum. Karena upaya yang dilakukan adalah menerapkan kebijakan kota "tertutup" bagi warga kota. Kebijakan ini dilakukan dengan membatasi penduduk yang ingin menjadi warga kota. Caranya aparat pemerintah kota mempersulit memberikan identitas diri secara sah dan formal menjadi penduduk kota.

Selain itu kebijakan yang bersifat punitif ini dengan model program-program pembaruan kota didahului dengan melakukan pembongkaran daerah-daerah pemukiman liar dan daerah-daerah *slum*. Orang-orang yang digusur dari daerah-daerah perkampungan kumuh dan liar diusahakan dipulangkan ke daerah asal. Sebagian lain setengah dipaksa untuk mengikuti program perpindahan penduduk ke luar pulau atau transmigrasi. Berbagai cara ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya untuk menyingkirkan kalangan miskin sebagai realisasi kebijakan yang bersifat menghukum.

Kedua. Pendekatan kebijaksanaan. Termasuk pendekatan ini seperti program-program konsumtif atau kebijaksanaan yang dapat dibagi kembali.

Misalnya adanya kebijakan subsidi untuk memperoleh perumahan atau pelayanan lainnya. Termasuk juga kebijakan yang berupaya memenuhi kebutuhan pokok. Hanya saja kebijakan ini di negara-negara sedang berkembang banyak mengandung keterbatasan yang disebabkan terbatas adanya sumberdaya. Akibatnya pendekatan kebijakan ini berimplikasi tidak meratanya sasaran programnya. Sasaran kalangan miskin yang dapat dicapai melalui berbagai program amat terbatas dan hanya sebagian kecil yang dapat dijangkau.

Ketiga, kebijakan yang berlandaskan suatu analisa dari sumber-sumber kemiskinan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan diagnostik atau pendekatan struktural. Penekanan dari pendekatan ini bukan pada meniadakan kemiskinan tetapi mencoba menulik lebih dalam terhadap faktor-faktor penyebab yang menyolok dari problem kemiskinan. Karena itu program-programnya berangkat dari rasionalisasi dari akar penyebab masalah yang muncul sehingga pada akhirnya dapat mencari berbagai jawaban dan sekaligus melakukannya tindakan antisipasinya.

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin —antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, program takesra-

Kukesra, KURK, dan lain-lain— membangun infrastruktur di permukiman umuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan, dan lain-lain.

Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di sisi lain, tak bisa diingkari fakta, bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar.

Menurut Djojokadikusumo (1988) pemanfaatan kredit ada dua macam, yaitu untuk produktif dan konsumtif. Kredit produktif adalah kredit yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sementara kredit untuk konsumtif adalah kredit yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari atau untuk bertahan hidup.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1995), pada dasarnya lambatnya perkembangan ekonomi rakyat disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mana hal itu merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama tanah dan modal. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa

ditabung bagi pembentukan modal. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok sehari-hari.

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurangnya dibangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Acap terjadi, kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal. Dalam konteks ini, sebagai sebuah prakarsa baru, Program GERDU TASKIN sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis. Sebab, sejak awal disadari bahwa tujuan program ini adalah memandirikan dan memberdayakan komunitas di tingkat lokal untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan menurut kemampuan dan inisiatif mereka sendiri secara terpadu.

Namun demikian, selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan —baik di tingkat nasional, regional maupun lokal— umumnya adalah dengan menerapkan pendekatan ekonomi semata, yang seringkali kurang mengabaikan peran kebudayaan dan konteks lokal masyarakat. Kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya (Karnaji dkk., 2000). Kendati secara harafiah nama berbagai program pengentasan kemiskinan dan program JPS berbeda-beda, tetapi

substansinya sesungguhnya hampir sama, yakni memberikan aliran modal kepada masyarakat miskin dan meminta mereka bekerja lebih keras untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Penelitian yang dilakukan Bagong Suyanto (1991-1995) tentang peran berbagai lembaga kredit pedesaan —seperti Perum Pegadaian, BPR, lembaga KURK, Kredit Usaha Tani, dan sebagainya— yang sebenarnya dimaksudkan untuk membantu kegiatan produktif masyarakat, menemukan ternyata banyak nasabah yang memanfaatkan kredit yang diperolehnya itu bukan untuk kegiatan produktif, melainkan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, terutama untuk makan sehari-hari. Tekanan kebutuhan sehari-hari yang senantiasa mengancam dan kewajiban untuk menghidupi anak dan semacamnya telah membuat banyak keluarga atau golongan masyarakat miskin sulit untuk mengembangkan usahanya.

Apa yang sudah terjadi selama ini, mengajarkan pada kita bahwa upaya untuk mengentas masyarakat dari kubangan perangkap kemiskinan dan sekaligus untuk membangun keluarga sejahtera yang diperlukan bukan cuma paket "nasi bungkus" bantuan ekonomi atau upaya-upaya yang sifatnya karitas saja (Rahardjo, 1986). Paket-paket bantuan ekonomi di satu sisi akan rawan bias dan justru memperlebar ketimpangan dan kesenjangan antar kelas, sementara di sisi lain upaya-upaya karitas dengan cara menyantuni secara peruh dan menjadikan keluarga-keluarga miskin sebagai obyek amal justru akan menimbulkan

ketergantungan saja di pihak mereka yang disantuni dan akhirnya justru akan cuma menimbulkan ketidakberdayaan keluarga atau masyarakat miskin.

Menurut Korten dan Carner (1988), kekurangan pokok dari model-model pengentasan kemiskinan yang banyak dipraktekkan di Negara Sedang Berkembang adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Bagi Indonesia, kritik Korten dan Carner ini tampak sangat relevan. Banyak bukti menunjukkan, paket-paket program pengentasan kemiskinan di Indonesia memang lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi daripada bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan.

Untuk memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor, karena itu yang diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang lebih mendasar —sebuah kebijakan anti-kemiskinan yang benar-benar harus mendahulukan serta berdimensi kerakyatan. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan.

Menurut Korten (1982), asumsi dasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, akan tetapi akan



berorientasi pada potensi manusia. Melalui potensi manusia maka kemampuan pengembangan diri sesuai dengan keinginan dapat diharapkan. Orientasi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tiga dasar pemikiran, yakni. Pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas. Kedua, mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swa-organisasi. Ketiga, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Esensi dari pemberian kredit pada dasarnya adalah untuk memberdayakan kalangan miskin atau meningkatkan kesejahteraan. *Empowerment* yang lebih dikenal sebagai arti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian perkembangan alam pemikiran masyarakat dan kebudayaan Barat utamanya Eropa. Lahirnya substansi konsep *empowerment* tak dapat dilepaskan pada situasi masyarakat saat itu yang masih banyak dikendalikan secara mutlak oleh suatu dogmatis agama.

Sebelum dekade tahun 70-an, konsep *empowerment* belum menunjukkan satu perkembangan yang berarti. Baru dekade tahun 70-an konsep *empowerment* mulai menampakkan diri. Konsep *empowerment* sendiri dimungkinkan

berkembang bersamaan dengan konsep-konsep yang hampir memiliki arti yang tidak jauh berbeda. Misalnya konsep pembebasan, kekuasaan, gerakan populis, anti struktur, legitimasi, idiologi, elit dan konsep *civil society*.

Faktor ekonomi menjadi pendorong lahirnya Eropa Modern selain kekuasaan yang terpusat. Seperti kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada kerajaan dan gereja, ekonomi tidak jauh berbeda. Semenjak lahirnya Eropa Modern ini terjadi perubahan struktur ekonomi. Liberalisasi dan emansipasi serta rasionalitas manusia sangat besar pengaruhnya terhadap munculnya pusat-pusat perdagangan baru sehingga semakin luas wilayah aktifitas ekonomi. Dari sini pula kemudian semakin banyak muncul kota-kota baru yang menjadi tempat aktifitas ekonomi.

Kekuasaan menjadi bukan lagi satu-satunya sebagai sumber *empowerment*, tetapi ekonomi menjadi salah satu basis untuk menjadi pesaing gereja dan agama. Karena itu faktor ekonomi ini menjadi faktor yang semakin mempercepat lajunya pertumbuhan Eropa Modern. Rasionalitas, kemerdekaan dan individualisme ternyata menjadi kekuatan yang besar setelah bertemu dengan kesadaran ekonomi yang kemudian menjadi basis kekuatan yang tidak dapat dianggap sepele.

Konsep pemberdayaan harus mewujudkan diri tidak hanya pada tingkatan individu tetapi juga kolektif. Pemberdayaan sebagai sarana untuk membangun pribadi, keluarga masyarakat bangsa, pemerintahan, negara dan atata dunia yang

memiliki dasar aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perwujudannya tersebar dalam segi kehidupan, politik ekonomi, pendidikan dan sisi kehidupan lainnya.

Dari mana upaya pemberdayaan itu dilakukan? Pertanyaan ini penting diungkapkan karena dalam perjalanan sejarah *empowerment* sangat terlihat jelas muatan individualisme terlihat mengedepan. Pemberdayaan ternyata tidaklah mutlak dapat dilakukan hanya pada individual semata. Telah terbukti perkembangan ekonomi yang hanya mengedepankan konsep individu semata telah melahirkan malapetaka kemanusiaan.

Karena itu kemudian dalam membicarakan pemberdayaan banyak ahli setuju bahwa rumah tangga sebagai sumber utamanya. Rumah tangga adalah merupakan unit dasar suatu masyarakat, yang didalamnya terlihat miniatur pemerintahan dan ekonomi. Menurut Friedmann (1992) dalam rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan, yaitu sosial, politik dan psikologis. Kekuatan sosial misalnya akses terhadap kebutuhan dasar produksi seperti informasi, pengetahuan dan ketrampilan, partisipasi organisasi, dan sumber-sumber keuangan. Kekuatan politik seperti misalnya keleluasaan untuk menentukan keputusan masa depan. Sementara kekuatan psikologis misalnya potensi individu yang berupa percaya diri yang tinggi. Potensi psikologis ini yang menjadi dasar memiliki jiwa perjuangan diri yang tinggi pula yang pada akhirnya menjadi perjuangan rumah tangga menjadi menyala-nyala.

Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya memberikan pengaruh yang besar di arena politik baik lokal maupun nasional. Dalam konteks ini maka pemberdayaan dapat bersifat individual maupun kolektif. Individual karena dapat mengambil tindakan atas nama pribadi, sementara kolektif karena pengaruhnya terhadap kelompok yang berada pada lembaga-lembaga sosial.

Proses pemberdayaan menurut Pranaka dan Moeljarto (1996) ada dua kecenderungan, yaitu: pertama proses pemberdayaan yang menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu agar lebih berdaya. Pemberdayaan ini dapat dimulai dengan pembangunan yang memberikan penguatan pada kepemilikan asset material. Kecenderungan pertama ini merupakan makna primer dari pemberdayaan.

Kedua adalah pemberdayaan yang memiliki makna sekunder. Pemberdayaan dalam makna ini dilakukan melalui proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan. Pemberdayaan didorong melalui rangsangan yang berupa motivasi ini pada akhirnya dapat dijadikan kekuatan untuk menentukan pilihan hidupnya. Penentuan pilihan hidup ini tentu bukan dari satu arah semata tetapi telah melalui proses diaiog sebagai reaksi dari lingkungannya.

Sementara itu Kabeer (1994) melihat bahwa yang dinamakan ketidakberdayaan bukan berarti tidak adanya kekuatan sama sekali oleh individu atau masyarakat, tetapi masih "tersisa" atau masih memiliki sedikit kekuasaan. Hanya saja kekuasaan atau kekuatan yang sedikit itu ternyata mampu bertahan bahkan dapat menggulingkan pemegang kekuatan lain.

Khusus pemberdayaan dalam bidang pendidikan, menurut Babari dan Priyono (1996:72) diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Pemberdayaan dalam kelompok masyarakat miskin menurut Moeljarto (1996:131) yang dikutip dari buku panduan IDT dikatakan bahwa yang disebut berdaya apabila ada kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelambagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi.

Menurut Kartasasmita (1995) pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Asumsi ini dilatarbelakangi bahwa setiap

individu atau masyarakat memiliki potensi yang dapat berkembang dan dikembangkan. Salah satu potensi yang dimiliki individu adalah kemandirian untuk dapat mempertahankan diri. Ketika kemandirian sudah dapat muncul dan berkembang pada setiap individu secara langsung atau tidak akan berdampak pada kemandirian masyarakat. Masyarakat adalah merupakan kumpulan dari individu-individu yang ada. Miniatur masyarakat dapat di lihat dari suatu keluarga. Karena itu proses pemberdayaan berakar kuat pada kemandirian individu yang ada di tengah-tengah keluarga.

Pemberdayaan menurut Bookman dan Morgen (1988) adalah sebagai konsep yang sedang populer mengacu pada usaha menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilitas ke atas dan memberikan pengalaman psikologis sehingga seseorang memiliki perasaan dan kesadaran berdaya.

Karena itu upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat atau individu harus dilakukan dengan cara memberi rangsangan dari luar. Paling tidak individu atau masyarakat dapat melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Dalam artian ada reaksi balik dari rangsangan yang diberikan pihak lain. Molyneux (1985) memandang bahwa rangsangan yang berasal dari luar merupakan langkah strategis yang diperlukan dalam proses pemberdayaan. Kendati ada ahli yang melihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan dengan jalan memberi rangsangan atau motivasi ini sebagai kecenderungan sekunder.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat. Langkah kedua ini diikuti dengan menerapkan langkah-langkah nyata. Misalnya dengan cara menampung berbagai masukan, menyediakann prasana, dan sarana baik fisik maupun sosial. Penyediaan fasilitas sekolah, pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat terutama kalangan bawah. Untuk memperkuat potensi yang dimiliki individu maka diperlukan juga tersedianya pendanaan, pelatihan atau pemasaran di desa. Sarana dan prasarana ini merupakan realisasi pemberdayaan sebagai upaya memperkuat potensi yang dimiliki rakyat.

Ketiga, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pemberdayaan ini memiliki makna bahwa masyarakat yang berada pada posisi lemah atau bawah tidak konstan di bawah atau malah justru semakin lemah atau berlutut di kubangan bawah tanpa ada mobilitas ke atas. Pencegahan kaum lemah yang semakin dipinggirkan atau diperlemah oleh pihak yang lebih kuat perlu dilakukan. Upaya untuk memberi perlindungan ini sebagai pencegahan dari persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi atas yang lemah oleh yang kuat.***

Bab III

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menerima kredit. Termasuk di dalamnya mengetahui usaha macam apa yang ditekuni oleh kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) penerima kredit.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL). Termasuk di sini apakah kredit yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan produktif ataukah justru dimanfaatkan untuk keperluan yang konsumtif.
3. Untuk mengetahui bagaimanaka gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

5. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Dapat mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang potensi yang dimiliki sektor informal sehingga lebih memudahkan menyusun berbagai program aksi untuk menangani permasalahan kota khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL)
2. Memberikan masukan khususnya melakukan penyusunan langkah-langkah operasional sehingga dapat mengantisipasi keberadaan PKL yang tidak dapat dihindari dari perkembangan sebuah kota khususnya Surabaya.

Bab IV

Metode Dan Prosedur Penelitian

1. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian ini adalah studi deskriptif yang mencoba memberikan gambaran secara rinci bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima PKL yang tergabung dalam Paguyuban Gotong Royong yang berada di Taman Hiburan Rakyat (THR) kota Surabaya.

2. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya. Lokasi ini dipilih karena PKL yang tergabung dalam Paguyuban Gotong Royong mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 300.000.000,- pada tahun 2002.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah PKL yang menjadi anggota Paguyuban PKL Gotong Royong yang ada di THR. Jumlah sampel direncanakan sebanyak 50 responden.

4. Teknik Penarikan sampel

Semua responden akan dipilih dengan menggunakan teknik *systematic random* sampling. Daftar nama-nama penerima kredit akan diperoleh dari

pengurus Paguyuban PKL Gotong Royong yang ada di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya. Penelitian ini direncanakan di lakukan di kota Surabaya, tepatnya di Taman Hiburan Rakyat (THR). Hal ini disebabkan PKL yang menerima kredit dari Pemerintah Kota Surabaya hanya yang berada di THR.

5. Teknik Pengumpulan data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

Pertama, melakukan wawancara langsung kepada responden terpilih.

Wawancara ini dilakukan dengan panduan kuesioner baik tertutup maupun terbuka yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data yang digali melalui cara ini antara lain mengenai karakteristik PKL termasuk sosial ekonomi. Termasuk usaha macam apa yang ditekuninya.

Kedua, mengumpulkan data sekunder. Seperti misalnya data perkembangan jumlah kredit, baik dari data resmi birokrasi pemerintah kota atau data dari paguyuban PKL.

Ketiga, melakukan observasi langsung terhadap lokasi di mana PKL melakukan aktivitasnya. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kehidupan PKL penerima kredit sekaligus untuk memudahkan peneliti melakukan wawancara.

6. Teknik Analisis

Data yang diperoleh akan diolah terutama dengan analisis kualitatif, yaitu menyajikan data secara terinci sehingga dapat diperoleh suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.***

Bab VI

Analisis dan Pembahasan

Ketika kota tumbuh menjadi metropolitan, tetapi sayang tidak diikuti dengan kesiapan kota itu untuk menyediakan fasilitas publik dan kesempatan kerja yang memadai bagi masyarakat miskin dan kaum urban, maka yang terjadi kemudian adalah kota itu cenderung akan bersikap ambivalen, dan bahkan tumbuh kontradiktif.

Selama ini, banyak kajian telah membuktikan bahwa sektor informal sebetulnya adalah salah satu bentuk respon migran dan masyarakat miskin di kota terhadap pembangunan antardaerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan kemiskinan. Artinya, kehadiran dan perkembangan sektor informal di berbagai kota besar bukan didorong oleh faktor internal dalam diri mereka sendiri, tetapi lebih merupakan akibat dari terjadinya bias urban dalam pembangunan.

Sepanjang di kota tersedia kesempatan kerja di sektor formal, yang cukup sebetulnya sebagian besar kaum migran sebenarnya lebih senang terserap di sana daripada bekerja pada sektor yang tidak terlindungi dan seringkali menjadi obyek penertiban kota yang dilakukan para tibun. Tetapi, karena arah investasi dan modernisasi yang bias urban terbukti menimbulkan *endave* yang tidak ramah terhadap tenaga kerja migran yang tidak atau kurang berpendidikan, maka

perkembangan sektor informal pun menjadi tak terhindarkan. Meski dari kacamata hukum tindakan migran menggelar dagangan di ruang publik, seperti trotoar, pinggir jalan atau di stren-stren kali jelas-jelas melanggar hukum. Namun demikian, karena tiada alternatif lain yang dapat dilakukan, akhirnya sektor informal menjadi pilihan yang realistis bagi para migran. Dalam hal ini, perbedaan tingkat upah serta kesempatan kerja di desa dan di kota merupakan faktor yang menstimuli angkatan kerja untuk pindah ke kota (Rachbini, 1991).

Bagi kota yang ingin menata dan menertibkan wilayahnya, kehadiran sektor informal acapkali memang menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan masalah ketertiban, lalu-lintas, keamanan, serta kebersihan kota. Persoalan ini menjadi lebih rumit karena sebagian para pelaku sektor informal datang dari desa-desa yang kini tidak lagi nyaman untuk dihuni, justru karena proses industrialisasi dan komersialisasi yang dihela oleh warga kota dan pembangunan ekonomi. Akibat proses komersialisasi dan modernisasi pedesaan yang justru memporak-porandakan struktur sosial masyarakat desa dan menyebabkan desa kehilangan sejumlah besar kesempatan kerja karena proses efisiensi, maka tiada pilihan lain bagi masyarakat kecuali melakukan migrasi dan mencoba mengadu nasib di kota-kota besar, termasuk di Surabaya.

Di kota besar sendiri, kalau bisa memilih barangkali tidak banyak kaum migran yang berkeinginan bekerja di sektor informal kota yang dari segi hukum melanggar aturan dan tanpa perlindungan. Dengan segala keterbatasan yang

dimiliki, mau tidak mau satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kaum migran adalah bekerja di sektor informal kota —yang *notabene* merupakan bagian dari kegiatan “ekonomi bayangan” yang beroperasi pada unit-unit kecil yang efisien dan sesuai dengan karakteristik migran. Menurut Hans-Dieter Evers (1991) yang dimaksud dengan “ekonomi bayangan” (*schattenwirtschaft*) adalah seluruh kegiatan ekonomi yang tidak terliput oleh statistik resmi pemerintah, dan karenanya tidak terjangkau oleh aturan dan pajak negara. Bagi kaum migran, meski pun mungkin pekerjaan yang mereka tekuni tidak memiliki kepastian hukum, dan bahkan cenderung berhadapan dengan hukum, tetapi karena kesempatan untuk masuk pada sektor yang lain cenderung tertutup, maka pelan-pelan mereka pun menjadi terbiasa mengembangkan pola hidup yang kenyal dan bermain kucing-kucingan dengan aparat penertiban.

PKL yang direkolasi ke THR sebenarnya, sama saja melepaskan diri dari kejaran aparat dispol PP. Lokasi PKL yang berada di THR memang pilihan dari pemerintah kota Surabaya, karena itu kecil kemungkinan akan diabrak secara kasat mata. Tetapi PKL yang direlokasi sebenarnya sama saja dengan “diabrak” secara halus dan perlahan, terutama dilihat dari tempat yang tidak strategis untuk berjualan.

Lokasi THR berada di belakang, selain itu ditambah jalan masuknya gelap karena minimnya penerangan. Sebenarnya banyak orang tahu, tapi jalan masuknya gelap menjadi hambatan tersendiri. Di THR banyak pengunjung tetapi

bukan calon pembeli. Pengunjung di THR sebagian besar adalah remaja yang sedang memadu kasih atau pacaran. Banyak anak-anak muda yang mojik-mojok dan pacaran di tempat yang remang-remang cenderung gelap. Karena itu orang-orang tua yang berjalan-jalan mengajak anaknya melihat pemandangan seperti akan enggan ke THR. Suasana gelap dan banyaknya anak-anak muda yang berpacaran menjadikan THR di waktu malam hari jarang dikunjungi orang baik untuk sekedar rekreasi atau berniat belanja. Minimnya pengunjung THR yang sangat jauh dengan di Taman Surya menjadikan PKL banyak yang gulung tikar atau mencari tempat berjualan di lokasi lain.

Pada tahun 2001 akhirnya PKL yang semula menempati Taman Surya dapat dipindah ke Taman Hiburan Rakyat. Beberapa waktu kemudian baik PKL dari Taman Surya maupun yang sebelumnya berada di Taman Hiburan Rakyat membentuk paguyuban yang kemudian di beri nama: Paguyuban Pedagang Kali Lima (PKL) Gotong Royong Taman Hiburan Rakyat (THR). Pada waktu itu tercatat sebanyak 403 PKL menjadi anggota paguyuban. Barang dagangan yang dijual para pedagan beraneka macam seperti misalnya pakaian, alat-alat rumah tangga, manik-manik, tas, sabuk, makanan dan minuman.

Pada awalnya ada pemikiran kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah untuk menghidupkan kembali THR. Namun, keberadaan PKL di tempat yang pernah berjaya pada tahun 1960 sampai 1980-an dengan Srimulatnya itu justru

kemudian hari kurang dapat berkembang sesuai dengan tujuan semula. Tidak sedikit PKL yang gulung tikar dan meninggalkan THR.

Kehadiran PKL dari Taman Surya pada mulanya tidak dapat dipungkiri ikut membuat semarak tempat itu. Paling tidak mereka berdagang di malam hari dan menarik orang untuk datang. Namun sayang keramaian PKL tidak berumur panjang. Kendati pernah ada usaha penataan dengan adanya pinjaman tenda dari pemerintah kota. Usaha meramaikan THR akhirnya ada sejumlah faktor yang menyulitkan pengembangan THR, antara lain posisinya yang berada di belakang bangunan Surabaya Mal sehingga tidak strategis. Sebagian fasilitas seperti listrik juga masih bergabung dengan mal.

Di tengah lesunya konsumen yang datang ke THR, nasib PKL yang ada semakin memprihatinkan karena musibah kebakaran sempat menimpa beberapa stand. Lengkap sudah nasib menggenaskan menimpa Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya. Lebih memprihatinkan dan kemungkinan besar akan semakin memilukan lagi terutama dialami oleh orang-orang yang selama ini menggantungkan hidupnya dari tempat yang pernah menjadi salah satu *icon* kota Surabaya.

Jika seseorang datang ke kota Surabaya tidak sempat meluangkan waktunya *mampir* ke Taman Hiburan Rakyat (THR) dan menikmati kelucuan hasil produksi pabrik tawa lawak Srimulat sama saja belum pernah menginjakkan kaki

di kota yang dikenal dengan kota Pahlawan. Namun sayang masa kejayaan *icon* Surabaya itu kini telah terlewati, yang tersisa nasib merana dan memprihatinkan.

Upaya menghidupkan kembali bahkan kalau bisa menapaktilas kejayaan Srimulat telah berkali-kali dicoba. Tetapi berkali-kali itu juga nasib Srimulat tidak pernah berubah dari keterpurukan. Tragisnya lagi di saat-saat ada moment-moment tertentu seperti ketika kota Surabaya merayakan Hari Ulang Tahunnya ke 711 yang baru lalu, Srimulat tidak diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan.

Nasib kurang beruntung tidak saja dijalani dan dirasakan oleh para seniman Srimulat atau ketoprak semata tetapi juga para pedagang yang mengadu nasib mencari keuntungan di THR. Para pedagang yang mengais rejeki di THR tak ubahnya seperti pepatah: hidup enggan mati tak mau. Pilihan berjualan atau apapun aktivitas ekonomi bertujuan mengais rejeki di THR memang bukanlah merupakan pilihan atas kesadaran dan pertimbangan insting bisnis yang menguntungkan.

Awak seniman Srimulat misalnya, telah banyak menunjukkan bagaimana keseriusan usahanya yang ditunjukkan supaya ingin tetap eksis atau kalau bisa dapat berkembang ternyata tidak banyak mendapat dukungan. Pilihan tetap menghidupkan THR merupakan pilihan satu-satunya di tengah konteks maraknya hiburan-hiburan modern yang tumbuh berkembang ditengah kota Surabaya. Kasus para pedagang yang mengais rejeki di lingkungan THR juga tidak berbeda dengan para seniman (Srimulat). Para pedagang yang berjualan setiap sore saja

ataupun setiap hari (siang dan malam) di lingkungan THR adalah pilihan yang lebih banyak diwarnai oleh keterpaksaan. Logika *nrimo ing pandhum* yang biasanya menjadi "hak" kalangan petani pedesaan ternyata diadopsi para pedagang yang berjualan di kompleks THR.

Dari segi bisnis telah banyak diungkapkan bahwa kawasan kompleks THR tidak menjanjikan keuntungan. Telah banyak bukti bahwa THR tetap tak dapat berkembang jika dibiarkan secara mandiri tanpa ada uluran dari pihak-pihak yang memiliki sumberdaya baik politik maupun ekonomi. Ketika walikota Surabaya Cak Narto almarhum —yang waktu itu dikenal sebagai babapake wong cilik— telah mencoba menghidupkan THR dengan mendatangkan para PKL untuk berjualan. Setiap sore, ketika itu Cak Narto harus merogoh koceknya yang tidak sedikit, karena setiap pedagang yang akan berjualan diberinya uang sebanyak Rp 10.000,—Rp 20.000,-.

Niat baik dan usaha Cak Narto almarhum inipun gagal, para pedagang tidak dapat bertahan lama berjualan di THR. Para pedagang akhirnya memilih meninggalkan kompleks THR dan berjualan di berbagai tempat yang lebih laku, kalau tidak mau segera gulung tikar atau bangkrut. Salah satu sebab kenapa THR tidak dapat berkembang atau malah justru diambang kematian (sudah mati?) karena kurang serius menanganinya. Kendati THR bukanlah lokasi yang menjanjikan khususnya bagi PKL, tetapi pemerintah Kota Surabaya tetap bersikukuh menjadikan tempat relokasi pedagang. Beberapa tahun yang lalu

berkembang wacana yang kuat THR dijadikan tempat relokasi bagi pedagang (PKL) yang menjamur di berbagai sudut kota terutama di jalan-jalan protokol.

Wacana ini tidak dapat berjalan mulus karena para PKL menolak dipindah ke THR. Berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa para pedagang meninggalkan THR karena tidak laku. Selain itu di THR tidak ada penanganan yang serius untuk mendukung aktivitas PKL yang akan dipindah supaya tidak mati, maka upaya relokasi mendapat tentangan yang sangat keras. Kendati menentang dan menolak secara keras bagaimanapun, tetap saja para pedagang akhirnya harus menerima kehendak pemerintah kota. Pedagang yang berjualan di fasilitas publik harus hengkang dan masuk di kompleks THR. Bagi yang menolak harus mau menganggung resiko selalu diobrak jika tetap bandel berjualan di trotoar atau pinggir jalan.

Pedagang sudah banyak mengetahui jika di THR merupakan tempat yang tidak layak untuk berjualan kategori PKL. THR bukan tempat keramaian seperti pada masa kejayaan Srimulat, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang seperti halnya di Taman Surya. Karena itu ketika para pedagang yang pindah ke THR akhirnya banyak yang gulung tikar.

Dalam bab ini, secara rinci akan dibahas bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menerima kredit? Termasuk di dalamnya usaha macam apa yang ditekuni oleh kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) penerima kredit? Bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima

Pedagang Kaki Lima (PKL)? Termasuk di sini apakah kredit yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan produktif ataukah justru dimanfaatkan untuk keperluan yang konsumtif? Dan bagaimanakah gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)? Termasuk di sini bagaimanakah proses pencairan dan pembayaran cicilan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL)?

1. Profil Sosial PKL

Sebagai kaum migran, para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya (Rachbini, 1991; Yustika, 2000). Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining*nya lemah, dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.

Selama ini, salah satu faktor yang membuat PKL tetap gigih bertahan hidup di kota besar adalah tanggungjawab untuk menghidupi keluarga. Meski dari waktu ke waktu mereka harus menghadapi berbagai tindakan represif yang dilakukan aparat penertiban. Tetapi, karena rata-rata para PKL sudah berkeluarga dan memiliki anak-anak yang harus dihidupi dan disekolahkan, maka sekeras apa

pun kehidupan di kota besar, semuanya tetap tidak akan menyurutkan nyali. Dari 50 PKL yang terjaring sebagai responden penelitian ini, hanya 6% yang mengaku masih lajang. Sedangkan sisanya sebanyak 84% umumnya mengaku sudah menikah, dan bahkan 10% di antaranya sudah berstatus duda atau janda.

Tabel 1
Status Perkawinan

Status	Frekuensi (N)	Persentase (%)
1. Belum kawin	3	6
2. Sudah Kawin	42	84
3. Duda/ Janda	5	10
Total	50	100

Bagi para PKL —terutama yang sudah berkeluarga—, mereka sebetulnya bukan tidak mengerti bahwa pekerjaan yang ditekuni saat ini melanggar ketentuan dan beresiko. Tetapi, karena kesempatan kerja yang ada di desa asalnya cenderung makin langka, sementara di kota kesempatan kerja yang tersedia rata-rata mensyaratkan tingkat pendidikan dan keahlian tertentu, maka pilihan satu-satunya yang masih terbuka adalah berkerja di sektor informal. Dari 50 PKL yang diwawancarai, sebanyak 94% mengaku mereka saat ini telah memiliki anak, bahkan sebagian besar responden mengaku memiliki anak lebih dari 3 orang. Ada 4% responden mengaku memiliki anak lebih dari 5 orang. Bisa dibayangkan, apa yang harus dilakukan oleh seorang migran yang sudah berkeluarga dan memiliki anak untuk menghidupi keluarganya?

Bekerja serabutan dan seadanya, —bahkan terkadang pekerjaan yang tergolong paling kotor dan menjijikkan pun— bagi kebanyakan kaum migran adalah sebuah solusi yang realistis agar mereka tidak tergilas kehidupan kota yang serba keras (Oscar Lewis, dalam: Suyanto, 1996). Bagi kaum migran, ketika di desa sektor pertanian mengalami proses involusi yang hampir mencapai titik jenuh, lapangan kerja menyempit, maka “urbanisasi berlebih” dan masuk ke sektor informal adalah implikasi dari kesenjangan desa-kota yang tidak lagi dapat dielakkan. Pada saat mereka masih berusia kanak-kanak, memang kebanyakan anak-anak desa akan lebih banyak yang memilih tetap tinggal dengan orang tuanya: bekerja sembari sekolah di desa asalnya dan yang namanya tanggungjawab umumnya belum mereka kenal karena sebagian besar kehidupannya masih tergantung kepada orang tuanya masing-masing. Tetapi, lain soal tatkala usia responden mulai beranjak dewasa.

Tabel 2
Umur Responden

Umur	Frekuensi (N)	Persentase (%)
1. ≤20 tahun	8	16
2. 21-30 tahun	15	30
3. 31-40 tahun	20	40
4. 41-50 tahun	5	10
5. 51-60 tahun	2	4
Total	50	100

Sebagian besar responden penelitian ini: umumnya sudah berusia di atas 20 tahun, bahkan 10% responden berusia di atas 50 tahun. Yang jelas, hampir

semua responden tergolong penduduk usia produktif yang sudah semestinya bekerja dan mencari nafkah bagi sanak-keluarganya.

Bagi masyarakat desa, ketika anak sudah memasuki masa akil-balik, pilihan mereka dua: menikah dini atau mencoba memperpanjang masa lajang mereka dengan cara pergi keluar dari rumah atau desanya, dan kemudian mencari pekerjaan di kota-kota besar. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mengaku nasib dan bekerja di kota acapkali merupakan cita-cita yang ada di kepala sebagian besar anak-anak atau remaja desa yang mulai tumbuh menjadi dewasa.

Studi yang dilakukan White dan Tjandraningsih (1998), misalnya menemukan bahwa bagi anak perempuan, mengadu nasib ke kota dan bekerja di sana sebetulnya adalah salah satu mekanisme yang memang sengaja dikembangkan untuk menghindari pernikahan dini. Sedangkan, bagi anak laki-laki, mengadu nasib ke kota selain merupakan cermin kemandirian, ternyata juga dipandang sebagai "ritus" kehidupan yang sudah seharusnya dilewati sebelum benar-benar matang mencapai status sebagai orang dewasa atau calon Kepala Keluarga. Walau tidak selalu mencerminkan proporsinya, studi ini menemukan bahwa perbandingan antara PKL laki-laki dan perempuan adalah 6:4. Secara kuantitatif, kaum lelaki cenderung lebih dominan, sebab selain mobilitas sosial laki-laki memang cenderung lebih tinggi daripada kaum perempuan di pedesaan, juga karena di sebagian besar keluarga responden masih dominan berlaku nilai-

nilai patriarkhis. Artinya, tuntutan agar kaum lelaki lebih giat dalam mencari nafkah umumnya lebih kuat daripada kaum perempuan, dan di sisi lain kebebasan kaum laki-laki untuk mengadu nasib ke kota rata-rata kesempatannya juga lebih terbuka daripada kaum perempuan.

Tabel 3
Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (N)	Persentase (%)
1. Laki-laki	20	40
2. Perempuan	30	60
Total	50	100

Di mata kaum migran, salah satu faktor kenapa mereka menjadi PKL adalah karena sektor ini tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga siapa pun dapat masuk di sana. Berbeda, misalnya dengan pekerjaan di perusahaan swasta atau kerja kantor yang mensyaratkan tingkat pendidikan minimum tertentu, untuk dapat bekerja sebagai PKL satu-satunya prasyarat yang dibutuhkan adalah daya tahan dan semangat. Kalau pun saat ini ada sebagian kecil PKL yang diwawancarai ternyata berpendidikan setingkat SLTA (22%) atau Perguruan Tinggi (4%), hal itu terjadi semata-mata karena kesempatan kerja di kota memang makin langka. Diakui atau tidak, situasi krisis ekonomi yang terus berkepanjangan hingga saat ini memang telah menyebabkan cukup banyak warga masyarakat terpaksa kehilangan pekerjaan dan menjadi korban PHK —termasuk pula mereka yang berpendidikan setingkat SLTA dan PT. Di kota besar seperti

Surabaya, sudah bukan lagi hal yang aneh jika orang menemui ada sarjana yang bekerja sebagai sopir taksi, buruh kasar, dan termasuk pula bekerja sebagai PKL.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (N)	Persentase (%)
1. Tidak Sekolah	7	14
2. SD	12	24
3. SLTP	18	36
4. SLTA	11	22
5. PT	2	4
Total	50	100

Di mata golongan masyarakat miskin kota, yang namanya gengsi tampaknya sudah tidak lagi terbeli. Di mata mereka, yang terpenting adalah mereka dapat menghidupi sanak-keluarganya, dan syukur bila sektor informal yang mereka tekuni ternyata dapat memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Salah seorang sarjana yang terjerumus menjadi pedagang VCD di trotoar sepanjang Jalan Tunjungan, mengaku pada awalnya ia memang merasa sedikit malu karena terpaksa harus berdagang VCD di jalan-jalan. Namun, setelah ia merasakan nikmatnya memperoleh keuntungan puluhan ribu hanya dalam satu hari kerja, maka pelan-pelan rasa malu itu hilang, dan bahkan ia bertekad untuk terus mengembangkan usahanya yang diyakini tidak akan pernah mengalami titik jenuh.

Secara umum, jenis dagangan yang dijajakan para PKL tidak memiliki keterikatan (*linkages*) dengan usaha lain yang besar. Dari segi omzet dan modal yang dibutuhkan, rata-rata PKL memang merupakan unit usaha yang mandiri,

meski masing-masing termasuk renik, kecil, dan umumnya dilakukan serta melayani golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Berbeda, misalnya dengan toko atau minimarket yang menyediakan barang dagangan yang beraneka-ragam, para PKL umumnya memiliki spesialisasi barang dagangan, dan ini biasanya mengelompok sendiri-sendiri sesuai dengan jenis barang dagangan mereka. Ada sebagian PKL yang mengkhususkan menjual VCD bajakan dengan harga yang sangat miring bila dibandingkan dengan toko kaset resmi. Ada PKL yang khusus menjual sepatu, ikat pinggang aksesoris, makanan, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas, barang yang diperdagangkan para PKL umumnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, dan masing-masing sudah memiliki pelanggan atau pangsa pasar sendiri-sendiri.

Tabel 5
Jenis Dagangan

Jenis Dagangan	Frekuensi (N)	Persentase (%)
1. Makanan/ minuman	5	10
2. VCD/ kaset	3	6
3. Pakaian	20	40
4. Sepatu	10	20
5. Ikat pinggang	2	4
6. Sepatu/ sandal	4	8
7. Aksesoris	4	8
8. Buah	2	4
Total	50	100

Responden yang terjaring dalam studi ini sebagian besar (40%) berjualan pakaian seperti baju, celana panjang, celana pendek, kaos. Sebagian pedagang menjual pakaian satu jenis pakaian, misalnya baju, atau celana. Tetapi ada juga

yang menjual pakaian dengan jenis barang dagangan yang lebih dari satu. Misalnya seorang pedagang berjualan baju sekaligus kaos dan celana panjang. Dari jenis PKL yang berjualan di THR, sebagian besar berjualan pakaian, termasuk pakaian *second* baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebagai salah satu bagian dari sektor ekonomi bayangan (*shadow economy*), semua sektor informal di kota umumnya memang menduduki ruang yang diperuntukkan untuk orang banyak atau fasilitas publik kota, seperti trotoar, taman, jalan umum, jembatan penyebrangan, halte bis, dan sebagainya (*depriving public space*).

2. Pemanfaatan Kredit.

Penyaluran kredit lunak untuk sektor informal khususnya bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang dianggarkan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya, hingga kini masih terbatas. Kredit untuk PKL baru dikucurkan pada tahun 2002 kelompok PKL eks Taman Surya, yang kini direlokasi ke Taman Hiburan Rakyat (THR dengan total dana Rp 300 juta. Anggaran yang dikucurkan itu merupakan total anggaran yang dialokasikan untuk mendorong perkembangan sektor informal, khususnya PKL.

Bagi PKL yang ada di THR, adanya bantuan modal usaha merupakan hak yang dijanjikan oleh pemerintah kota Surabaya ketika akan di relokasi dari Taman Surya. Pada saat itu pemerintah kota merupakan pihak yang ada dibalik

pemindahan PKL Taman Surya ke THR. Sebelumnya relokasi ke THR tidak dapat berjalan lancar, karena adanya kekwatiran dari PKL, di tempat baru barang dagangannya tidak laku. Tetapi akhirnya relokasi dapat berjalan dengan sejumlah fasilitas yang diberikan termasuk adanya bantuan modal.

Bantuan modal bagi PKL THR yang diterima tahun 2002 dapat dikatakan pertama sekaligus terakhir. Sesuai dengan *iming-iming* pemerintah kota, PKL yang direlokasi akan mendapat perhatian tersendiri dibanding dengan lainnya, termasuk suntikan modal usaha. Setelah direlokasi dari Taman Surya, akhirnya kucuran dana diperoleh PKL THR. Pada saat itu dana yang dikucurkan sebesar Rp 300 juta. Kucuran dana yang diberikan semua berupa uang tunai. Berbeda dengan bantuan modal usaha di kalangan petani yang lebih bervariasi tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa natura seperti pupuk atau alat bertani. Bantuan modal yang diberikan PKL THR keseluruhan berupa uang. Dari 50 responden yang diwawancarai semuanya mengaku mendapatkan kredit berupa uang tunai.

Besar bantuan modal yang diterima tiap PKL tidak sama. Pemerintah kota tidak mengatur sampai berapa banyak yang harus diterima tiap-tiap PKL. Berapa jumlah yang harus diterima tiap PKL tergantung pengurus paguyuban PKL Gotong Royong yang ada di THR. Karena itu mengurus mengambil kebijakan, bahwa tiap PKL mendapatkan dana tidak sama besarnya.

Tabel 6
Besar Bantaun Modal yang Diterima

Besar(Rp)	Frekuensi (N)	Persentase (%)
500.000	34	68
1.000.000	12	24
2.000.000	4	8
Total	50	100

Besar-kecilnya bantuan dana yang diterima tergantung berapa omzet barang dagangannya. Bila omzet penjualannya di bawah Rp 1.000.000, mendapat kucuran dana sebesar Rp 500.000,-. Omzet penjualan antara Rp 1.000.000,- Rp 4.000.000,- mendapat Rp 1.000.000,-. Sedangkan jika PKL memiliki omzet penjualan di atas Rp 4.000.000,-, maka mendapat kucuran dana sebesar Rp 2.000.000,-. Dari 50 responden, sebesar 68% mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 500.000,-. Sementara itu responden yang mendapat kucuran dana Rp 1.000.000,- sebesar 24% dan sisanya sebesar 8% mendapat kucuran dana sebesar Rp 2.000.000,-.

Bagi pengurus, uang yang diterima dari pemerintah kota harus dibagi seadil mungkin ke seluruh anggota paguyuban. Kalau mengikuti keinginan anggota yang ada maka uang bantuan modal dari pemerintah kota tidak akan mencukupi. Tidak sedikit PKL yang ingin mendapat bantuan modal lebih besar dibanding ketentuan yang telah diputuskan oleh paguyuban. Bagi pengurus sendiri, uang bantuan modal yang diterima tiap PKL tergolong kecil bila dipergunakan untuk menambah modal. Tapi untuk menjaga agar semua anggota paguyuban dapat menerima maka akhirnya tidak dapat memuaskan semua keinginan PKL.

Tabel 7
Kesesuaian antara Permohonan Dengan yang Diterima

Kesesuaian	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Tidak sesuai	44	88
Sesuai	6	12
Total	50	100

Karena itu tidak mengherankan jika dari 50 pedagang, sebagian besar responden (88%) PKL yang mengaku tidak sesuai antara permohonan dengan jumlah uang bantuan modal yang diterima. Sementara itu hanya ada sebesar 12 PKL yang mengaku sesuai uang bantuan modal yang diterima dengan permohonan awal. Bila ditilik lebih lanjut, PKL yang mengaku menerima bantuan modal sesuai dengan permohonan adalah kalangan pengurus. Karena di kalangan pengurus paguyuban lebih mengetahui seberapa besar sebenarnya bantuan modal yang layak diterima masing-masing PKL.

Tabel 8
Pola Pemanfaatan Bantuan Kredit Usaha

Keterangan	Frekuensi	Persen
Semua untuk kegiatan konsumtif	9	18
Sebagian besar untuk kegiatan konsumtif	14	28
Sebagian untuk kegiatan konsumtif, sebagian untuk kegiatan produktif	17	34
Sebagian besar untuk kegiatan produktif	3	6
Semua untuk kegiatan produktif	7	14
Total	50	100

Meskipun tidak sesuai dengan keinginan jumlah kredit yang diterima para PKL, bukan berarti putus asa dan melakukan perlawanan. Responden tetap menerima bantuan modal usaha dengan lapang dada. Hanya saja bantuan

modal usaha tidak semua digunakan untuk keperluan produktif seperti menambah modal berjualan. Dari 50 responden yang diwawancarai ternyata hanya 20% yang menggunakan bantuan modal usaha untuk keperluan sebagian besar dan seluruhnya kegiatan produktif. Sementara itu sebesar 80% justru bantuan modal yang diterima digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan semula.

Pemanfaatan bantuan modal usaha oleh PKL Paguyuban Gotong royong lebih rinci terlihat bahwa hanya sebesar 14% yang menggunakannya untuk keperluan kegiatan produktif, seperti misalnya menambah modal berjualan. Sementara itu terdapat sebesar 18% responden yang mengatakan bahwa semua bantuan modal usaha dipergunakan untuk keperluan konsumtif. Sedangkan responden yang mempergunakannya untuk keperluan produktif maupun konsumtif sama-sama besarnya terdapat sebesar 34%. Selain itu masih terdapat sebesar 28% responden yang menggunakan bantuan modal usaha sebagian besar untuk keperluan konsumtif dibanding dengan produktif.

Penggunaan bantuan modal usaha untuk keperluan di luar tujuan semula oleh para responden apakah suatu kesengajaraan atautkah karena sebagai bentuk perlawanan terhadap kecilnya jumlah bantuan yang diterima? Terhadap pertanyaan ini sebagian besar responden memberi jawaban bahwa jumlah kredit yang diterima terlalu kecil, sementara di sisi lain pada saat yang bersamaan dengan penerimaan bantuan ada keperluan yang sangat mendesak untuk

dipenuhi. Karena penerimaan bantuan modal usaha pada saat memerlukan uang tunai bagaikan durian runtuh yang dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.

Tabel 9

Apakah Bantuan Modal Usaha Bagi yang Terlanjur Dipakai untuk Keperluan Lain

Keterangan	Frekuensi	Persen
Tidak diganti	31	72.0
Diganti seperlunya	7	16.5
Diganti sesuai yang sudah terlanjur dipakai	5	11.5
Total	43	100.0

Total responden 43 karena 7 responden menggunakan kredit untuk usaha produktif

Para responden umumnya memperlakukan bantuan modal usaha yang diterima bukanlah sebagai benda modal yang harus diganti penggunaannya, tetapi sebagai harta benda pribadi. Dari 43 responden yang mempergunakan baik sebagian maupun seluruhnya bantuan modal untuk kegiatan produktif, terdapat sebesar 72% mengatakan tidak perlu menggantinya. Sementara masih terdapat sebesar 16,5% responden yang mengatakan bahwa bantuan modal hanya seperlunya saja diganti. Artinya, kalau dipertegas maka responden tidak akan mengganti bantuan modal usaha yang sudah terlanjur dipergunakan untuk keperluan konsumtif.

Tabel 10
Bantuan Modal Usaha Dapat Membantu Memperbesar Usaha:

Keterangan	Frekuensi	Persen
Sangat tidak membantu	3	6
Tidak membantu	18	36
Cukup membantu	15	30
Membantu	9	18
Sangat membantu	5	10
Total	50	100

Penggunaan bantuan modal usaha untuk kegiatan diluar produktif bukan tanpa alasan. Para responden umumnya tidak begitu yakin dengan manfaat dari bantuan modal itu sendiri yang dapat meningkatkan kesejahteraan dengan cara mempergunakannya sebagai tambahan modal berjualan. Dari 50 responden, terdapat sebesar 36% yang mengatakan bahwa bantuan modal yang diterima tidak membantu usaha berjualann yang ditekuninya. Bahkan sebesar 6% responden mengatakan bahwa bantuan modal usaha yang diterima sangat tidak membantu usahanya. Kendati demikian masih terdapat sebesar 10% yang mengatakan bahwa bantuan modal usaha yang diterima sangat membantu usahanya

3. Proses Permohonan, Pencairan dan Péngembalian KUT.

Mekanisme penyaluran bantuan modal usaha telah didesain sedemikian rupa oleh pengurus sehingga dapat memudahkan PKL untuk memperolehnya. Penyalurannya program bantuan modal usaha PKL tidak lagi melalui birokrasi,

tetapi diserahkan secara langsung pengurus paguyuban PKL Gotong Royong PKL THR.

Salah satu alasan mendasar adanya perubahan mekanisme penyaluran bantuan modal usaha PKL adalah keefektifan dan keefisienan program itu sendiri. Dalam pengertian bahwa pedagang dapat memperoleh bantuan modal usaha dengan mudah dan dapat memanfaatkannya secara maksimal. Bukan rahasia lagi bahwa program-program yang ditujukan kepada masyarakat selama ini banyak mengalami gangguan seperti adanya kebocoran atau kesulitan-kesulitan lainnya.

Untuk mengatasi maka salah satu caranya adalah mendekatkan PKL sebagai penerima bantuan modal dengan pihak penyalur. Mekanisme ini ditempuh untuk mengurangi jarak meja yang harus dilalui yang berakibat lambatnya bantuan modal sampai ke pedagang. Panjangnya prosedur yang harus dilalui penyaluran bantuan modal usaha berakibat juga rawannya kebocoran dan tekanan kepada pedagang yang tidak mudah dilawan. Bentuknya misalnya "upeti" yang harus dibayar pedagang jika bantuan modal usaha dengan mudah dapat segera dicairkan.

Prosedur peminjaman dianggap mudah karena memang pedagang tidak harus memberikan persyaratan yang *njlimet* dan mendetail seperti halnya syarat-syarat dari prosedur peminjaman lainnya. Pedagang tidak harus memberikan data-data yang rinci tentang berbagai benda berharga yang dimiliki atau usaha yang sedang ditekuni seperti ketika akan meminjam ke lembaga bank. Kalau

seseorang akan melakukan peminjaman ke pihak bank, biasanya pihak bank akan melakukan survei terlebih dahulu. Apakah calon debitur ini memiliki syarat-syarat tertentu untuk diberi pinjaman.

Selain prosedur penyaluran bantuan modal usaha dianggap mudah, pedagang menganggapnya sebagai hal yang wajar sebagai mekanisme yang memang harus di lalui oleh sebuah proses peminjaman. Karena itu anggapan wajar terhadap prosedur penyaluran bantuan modal usaha bagi pedagang adalah memiliki arti memang prosedur itu yang mesti dilakukan sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program ini. Keberhasilan dalam pandangan pedagang adalah program ini tidak berhenti dan sebaliknya justru dapat membantu kesejahteraan kehidupan pedagang.

Kemudahan yang dinikmati pedagang memperoleh bantuan modal usaha paling mudah dapat dilihat tidak adanya agunan yang harus diberikan pedagang. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada pedagang memang tidak mensyaratkan adanya agunan seperti halnya kredit-kredit lembaga bank. Untuk mendapatkan bantuan modal usaha pedagang hanya cukup dengan meminjamkan beberapa saat Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pengurus paguyuban.

Kendati demikian di mata responden terdapat sebesar 46% yang menganggap bahwa proses untuk memperoleh bantuan modal usaha yang diterima masih merepotkan. Sementara itu terdapat sebesar 44% responden yang menganggap bahwa proses kucuran bantuan modal usaha yang diterima sebagai

prosedur yang wajar. Bahkan sebesar 10% responden yang menganggap bahwa proses kucuran bantuan modal adalah sesuatu yang mudah.

Terlihat bahwa *trust* atau kepercayaan merupakan agunan utama yang harus diberikan pedagang kepada kreditur atau kelompok. Pola peminjaman semacam ini —meminjam tidak memakai agunan— memang tidak lazim dalam dunia perbankan. Ketaklaziman itu terletak pada kemampuan membayar kembali debitur yang tidak dikenai tanggungan sebagai bentuk ikatan utang-piutang. Bagi dunia perbankan meminjam uang tanpa adanya agunan adalah sangat riskan bahkan tidak ada hukumnya dalam arti melanggar prinsip-prinsip perbankan. Dapat dikatakan sebagai "bunuh diri" bila meminjamkan uang tanpa adanya benda yang dapat menjadi agunan.

Bagi bantuan modal usaha prinsip perbankan semacam itu justru tidak berlaku. Tujuan utama bantuan modal usaha kepada pedagang bukan semata-mata uangnya atau dana dapat kembali, tetapi kesejahteraan dapat berubah meningkat. Pola peminjaman yang diterapkan pada bantuan modal usaha memang sangat rawan adanya tunggakan. Bagi peminjam atau debitur, walaupun menunggak maka tidak ada benda atau barang yang hilang sebagai pengganti uang yang telah dipinjam.

Bagi responden sendiri sejak awal rupanya sudah menyadari bahwa bantuan modal usaha tidak memerlukan agunan, tetapi hanya tetap melalui kelompok untuk memperolehnya. Karena itu tidak ada satupun responden yang

mendapatkan bantuan modal usaha dengan hanya mengandalkan pada individu masing-masing. Semua responden mendapatkan bantuan modal usaha melalui kelompok paguyuban PKL Gotong Royong THR.

Karena bantuan modal usaha langsung diserahkan ke kelompok Paguyuban PKL, maka dapat dimengerti jika di mata responden kucuran dana hingga dapat diterima tidak mengalami keterlambatan. Paling tidak sebesar 96% responden yang mengatakan bahwa penerimaan bantuan modal usaha melalui kelompok. Sementara sisanya merasa bahwa bantuan modal usaha dilakukan dengan cara usaha sendiri. Responden yang merasa bantuan modal usaha dilakukan dengan cara usaha sendiri berasal dari kalangan pengurus. Memang secara riil para pengurus paguyuban yang melakukan berbagai kegiatan sehingga bantuan modal usaha hingga sampai ke tangan para PKL anggota Paguyuban Gotong Royong.

Tabel 11
Keterlambatan Penerimaan Kredit Bantuan Modal Usaha:

Keterangan	Frekuensi	Persen
Sering	0	0
Jarang	4	8
Tidak pernah	46	92
Total	50	100

Peran kelompok Paguyuban PKL Gotong Royong, rupanya menjadi penentu bantuan modal usaha cepat atau lambat hingga sampai ke tangan anggotanya. Tampaknya pengurus payuyuban PKL Gotong Royong, tidak mau kalau bantuan modal yang sudah ada di tangan pengurus menimbulkan masalah dikemudian

hari. Karena itu pengurus segera meneruskan bantuan modal usaha hingga ke tangan naggota paguyuban. Karena itu tidak mengherankan jika sebagian besar responden (92%) mengatakan bahwa pencairan dana bantuan modal usaha tidak terlambat.

Walaupun demikian, bukan berarti keterlambatan yang terjadi berpengaruh terhadap usaha yang ditekuni PKL. Bagi responden, seandainya bantuan modal usaha yang hendak diterima terlambat tidak akan berpengaruh pada usaha yang ditekuni. Sebagian besar responden (46%) mengatakan bahwa keterlambatan kucuran dana bantuan modal usaha sama saja dengan tidak terlambat atau tepat waktu. Bahkan sebesar 18% responden mengatakan bahwa keterlambatan kucuran dana tidak berpengaruh dengan usaha berjalannya. Sedangkan terdapat sebesar 8% responden secara tegas mengatakan bahwa keterlambatan kucuran dana bantuan modal usaha sangat tidak berpengaruh terhadap aktivitas berjalan yang dilakukannya.

Tabel 12
Cara Responden Membayar Cicilan Bantuan Modal Usaha

Keterangan	Frekuensi	Persen
Langsung ke Pemerintah Kota	0	0
Melalui Pengurus Kelompok	34	68
Tidak Pernah Membayar	16	32
Total	50	100

Sejak semula bantuan modal usaha tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada PKL THR tanpa ada kewajiban mengembalikan. Sebaliknya bantuan modal

usaha yang diberikan terdapat kewajiban untuk mengembalikan kepada pengurus. Dari hasil pengembalian tersebut dapat diputar kembali dengan cara diberikan lagi kepada pedagang yang membutuhkan. Tetapi kasus bantuan modal usaha pada PKL Paguyuban Gotong Royong THR dapat dikatakan tidak membuahkan hasil. Hasil perguliran bantuan modal usaha yang pertama kali diberikan pemerintah kota Surabaya akhirnya macet dan tidak ketahuan rimbanya.

Walaupun begitu, pada awalnya beberapa responden sempat mengangsur kepada pengurus paguyuban. Dari 50 responden yang diwawancarai, terdapat sebanyak 68% yang mengaku telah mengangsur melalui ketua pengurus paguyuban. Ketika ditanya lebih lanjut, berapa kali telah mengangsur bantuan modal usaha yang telah diterima, ternyata responden sempat mengaku hanya sekali memberikan cicilan. Pada saat itu ada kesepakatan bahwa cicilan pertama harus dibayar setelah jangka waktu 4 (empat) menerima bantuan modal usaha. Hanya saja pada saat itu tidak ada kesepakatan yang pasti berapakah harus PKL penerima bantuan modal usaha harus mengangsur. Karena itu sistem pengembalian bantuan modal usaha PKL paguyuban Gotong Royong tidak ada ketentuan yang sama. Ada PKL yang bersedia mengangsur tiap bulan hingga bantuan modal tidak tersisa. Sementara itu ada yang bersedia mengangsur setiap tiga bulan sekali, bahkan ada PKL yang mengangsur semampunya.

Ketidaktegasan mengangsur bantuan modal usaha yang diberikan kepada PKL anggota Paguyuban Gotong Royong THR, akhirnya menjadi bumerang. PKL

yang bersedia dan sudah melakukan cicilan hanya sebesar 68%, itupun hanya sekali. Dilihat dari jumlah angsurannya, tiap anggota PKL yang menerima bantuan modal usaha berbeda-beda, paling kecil sebesar Rp 5.000 dan paling besar Rp 20.000,-. Sementara dari 50 responden terdapat sebesar 32% yang tidak pernah mengangsur.

Bagi responden yang terlanjur mengangsur sebenarnya ada rasa penyesalan kendati hanya sebagian kecil dibanding dengan jumlah bantuan modal usaha yang diterima. Karena belakangan diketahui uang angsuran yang diberikan hanya sekali itupun tidak ketahuan rimbanya. Sementara itu bagi PKL yang tidak pernah mengangsur merasa memang uang yang diterima merupakan haknya dan tidak perlu dikembalikan. Akhirnya bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah kota Surabaya sebesar Rp 300.000.000,- kepada PKL THR yang tergabung di dalam Paguyuban Gotong Royong tidak jelas kelanjutannya. Di sisi lain angsuran yang sempat diberikan kepada pengurus paguyuban Gotong Royong dimanfaatkan berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan THR agar banyak calon pembeli mengunjungi THR. Tetapi berbagai usaha dalam berbagai bentuk kegiatan menyemarakkan THR tidak kunjung membuahkan hasil hingga dana angsuran dari PKL tersedot habis tanpa hasil yang memadai.***

Bab VI

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dalam bab ini diuraikan beberapa kesimpulan dari temuan-temuan lapangan yang tetap berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu ada beberapa saran yang didasarkan pada temuan lapangan yang telah dikaji. Beberapa kesimpulan itu adalah:

1. Dari 50 PKL yang terjaring sebagai responden penelitian ini, hanya 6% yang mengaku masih lajang. Sedangkan sisanya sebanyak 84% umumnya mengaku sudah menikah, dan bahkan 10% di antaranya sudah berstatus duda atau janda. Sebanyak 94% mengaku mereka saat ini telah memiliki anak, bahkan sebagian besar responden mengaku memiliki anak lebih dari 3 orang. Ada 4% responden mengaku memiliki anak lebih dari 5 orang. Tingkat pendidikan responden adalah 14% tidak sekolah, 24% tamat SD, 36% Tamat SLTP, sebesar 22% adalah tamat . SLTA dan 4% lulusan perguruan tinggi. Dari segi jenis barang dagangan, terdapat sebesar 10% berjualan makanan/minuman, 6% berjualan VCD, 40% berjualan jenis pakaian, 20% berjualan sepatu, 4% berjualan ikat pinggang, 8% berjualan sepatu/sandal, 8% berjualan accessories dan sebesar 4% berjualan buah.
2. Pola pemanfaatan bantuan modal usaha justru lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Hanya terdapat sebesar 14% yang betul-betul

digunakan untuk kegiatan produktif. Sementara itu responden yang menggunakan sebagian besar dan seluruhnya dari dana bantuan modal untuk kegiatan konsumtif mencapai sebesar 46%. Bagi responden yang terlanjur mempergunakannya untuk kegiatan konsumtif sebagian besar (72%) menyatakan tidak akan menggantinya. Artinya tidak akan mempergunakan dana bantuan modal untuk kegiatan yang bersifat produktif. Karena itu terdapat sebesar 36% yang mengatakan bahwa bantuan modal yang diterima tidak membantu usaha berjualann yang ditekuninya. Bahkan sebesar 6% responden mengatakan bahwa bantuan modal usaha yang diterima sangat tidak membantu usahanya.

3. Untuk mendapatkan bantuan modal usaha pedagang hanya cukup dengan meminjamkan beberapa saat Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pengurus paguyuban. Bantuan modal usaha langsung diserahkan ke kelompok Paguyuban PKL, maka dapat dimengerti jika di mata responden kucuran dana hingga dapat diterima tidak mengalami keterlambatan. Dari 50 responden yang diwawancarai, terdapat sebanyak 68% yang mengaku telah mengangsur melalui ketua pengurus paguyuban. Ketidaktegasan mengangsur bantuan modal usaha yang diberikan kepada PKL anggota Paguyuban Gotong Royong THR, akhirnya menjadi bumerang. PKL yang bersedia dan sudah melakukan cicilan hanya sebesar 68%, itupun hanya sekali. Sementara dari 50 responden terdapat sebesar 32% yang tidak pernah mengangsur.

2. Saran

Berdasarkan temuan lapangan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang kompeten terhadap penataan PKL khususnya di lingkungan THR dan di kota Surabaya pada umumnya. Beberapa saran itu adalah:

- 1. Karena itu kebijakan apapun harus mendasarkan pada fakta riil di lapangan, bukan hanya sekedar mendasarkan pada Perda semata. Tidak menutup kemungkinan Perda yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Kebijakan apapun seharusnya mempertimbangkan tingkat perubahan masyarakat kota yang relatif cepat.**
- 2. Di sisi lain keterbatasan pemerintah kota menyediakan lapangan pekerjaan di sektor-sektor formal, seyogyanya menjadikan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai alternatif pekerjaan yang diakui keberadaannya di kota Surabaya. Pemerintah kota seyogyanya mau mengakui PKL sebagai bagian dari ekonomi kota. Karena itu pemerintah kota hendaknya menyadari dan mengakui bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh seiring dengan perkembangan kota. Keberadaan PKL seharusnya tidak ditempatkan sebagai bagian dari permasalahan kota. Karena itu keberadaan PKL bukan untuk dienyapkan, tetapi ditata dengan sejumlah peraturan sehingga menjadi bagian dari keindahan atau kekhasan kota Surabaya. Selama substitusi yang**

dapat menggantikan PKL belum ada (lapangan pekerjaan lain belum ada) maka selama itu pula PKL tidak mungkin dihilangkan.

3. Kalau pemerintah kota memiliki kemauan serius yang kuat untuk menata PKL yang ada, maka PKL tidak mendatangkan masalah-masalah dikemudian hari. Sebaliknya penataan yang serius terhadap PKL merupakan potensi tersendiri baik dari keindahan maupun ekonomi perkotaan. Seperti PKL di lapangan KODAM V Brawijaya, adanya PKL ternyata tidak mengakibatkan adanya kekumuhan/kekotoran, tetapi tetap terjaga kebersihan.
4. Perlu adanya konsistensi dan tidak setengah-setengah dalam menata PKL termasuk di dalamnya pemberian bantuan modal usaha. Studi ini menemukan bahwa bantuan modal diberikan hanya sekali tanpa ada kontrol, mekanisme yang jelas dan evaluasi serta kelanjutannya. Akhirnya bantuan modal tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bantuan modal usaha akhirnya diperlakukan sebagai rejeki nomplok tanpa ada keharusan mengembalikan dan bebas dipergunakan apa saja bukan sebagai modal produktif.***

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, 2003. *Urban Hidden Economy: Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: Lembaga Penelitian ITS.
- Azuma, Yoshifumi, 2001. *Abang Beca: Sekejam-Kejamnya Ibu Tiri, Masih Lebih Kejam Ibukota*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Baker, David , 1980. Memahami Kemiskinan di Kota, *Prisma* No. 6, Tahun VIII, Juni, 1980.
- Damsar, 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dorleans, Bernard, 1994. "Perencanaan Kota dan Spekulasi Tanah di Jabotabek", dalam: *Prisma* No. 2 Tahun XXIII Pebruari 1994.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993. *Masyarakat Hunian Liar di Kota: Sebuah Studi Kasus di Wonosito Kotamadia Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Evers, Hans-Dieter, 1982. *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: LP3ES.
- Evers, Hans Dieter dan Rudiger Korff, 2002. *Urbanisasi Di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Friedman, John. (1992) *Empowerment: The Politics Of Alternative Development*. Cambridge Mass: Bkackwell Publisher.
- Goldthorpe, J.E., 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Hartshorn, Truman A., 1980. *Interpreting The City: An Urban Geography*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Hauser, Philip M., 1985. *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan, Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Henytio, Medelina K. (1996) "Pemberdayaan Kelompok Miskin Pekerja". Dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implimentasi*. CSIS
- Herlianto, 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Alumni.
- Hidayat, 1979. *Sektor Informal dalam Struktur Ekonomi Indonesia*. Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan.
- Hulme, David & M. Turner. (1990) *Sociology of Development-Theories, Politics and Practices*. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Jellinek, Lea, 1995, *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta, LP3ES, 1995
- Kartono dkk,1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.
- Kabeer, Nila (1994) *Reserved Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. London: Verso
- Kartasasmita, Ginanjar. (1995) "Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi." *Bulletin Alumni SESPA*, Edisi keempat.
- Kartjono. (1995) "Pengalaman Bina Desa dalam Memperkuat Rakyat." Dalam Rustam Ibrahim (ed), *Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000*. CESDA-LP3ES
- Korten, David. (1988) "LSM Generasi Keempat: Fasilitator Gerakan Kemasyarakatan." *Prisma*, XVII, No 4.
- Knox, Paul, 1995. *Urban Social Geography, An Introduction*. England: Longman Scientific & Technical.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Lumban Toruan, Magdalena, 1991. *Sektor Informal Indonesia*, Jakarta: Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 14. Jakarta.
- Manning, Chris & Tadjuddin Noer Effendi, 1985. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal Kota*. Jakarta: Gramedia bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia dan Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM.

- Manning, Chris, Tadjuddin Noer Effendi & Tukiran, 1990. *Struktur Pekerjaan, Sektor Infoprmal dan Kemiskinan di Kota: Sebuah Studi Kasus di Diraprajan, Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- McAuslan, Patrick, 1986. *Tanah Perkotaan dan Rakyat Jelata*. Jakarta: Gramedia.
- Mokoginta, Lukman, 1999. *Jakarta Untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljarto, Vidhyandika. (1996) "Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT". Dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implimentasi*. CSIS
- Murray, Allison J. 1994. *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta*. Jakarta, PT. Pustaka LP3ES..
- Nas, P.J.M., 1979. *Kota di Dunia Ketiga, Pengantar Sosiologi Kota*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Prijono, Onny S. (1996) "Peran Organisasi Nirlaba, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Pola Interaksi dengan Pemerintah." Dalam Bantarto Bandoro, et.al, *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Prijono Onny S. dan A.M.W. Pranarka (Penyunting). (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implimentasi*. CSIS
- Rahardjo, 1983. *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rachbini, Didik J. & Abdul Hamid, 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.
- Soto, Hernando de, 1991. *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Subarseno, 1998. , " Kebijakan Terhadap Sektor Informal di Perkotaan", *Jurnal kebijakan dan Administrasi Publik*, vol. 2,
- Supriatn, Parsudi, "Struktur Perkotaan dan kehidupan Hunian Liar", dalam: *JIIS* Nomor 1, 1991.

Suyanto, Bagong, 1996. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Suyanto, Bagong dan Karnaji, 2002. *Menata PKL dan Bangunan Liar: Penelitian Kinerja Aparat penegak Hukum di Pemerintah Kota Surabaya terhadap keberadaan PKL dan Bangunan Liar*. Surabaya, Lutfansah Mediatama..

Tjiptiherijanto, Prijono, 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Todaro, Michael P., 2000., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta, Erlangga,.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1992. *Pemantapan Definisi Masyarakat Rentan, Studi Kasus di Kotamadya Surabaya*. Surabaya: FISIP Unair dan KLH.

Wirosardjono, Soetjipto, 1986. Pengertian Batasan dan Masalah Sektor Informal, *Prisma*, no. 3 Tahun XIV, 1985.

Yustika, Ahmad Erani, 2001. *Industrialisasi Pinggiran*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Personalia Tenaga Penerliti**1. Ketua Peneliti**

- 1.1. Nama Lengkap : Karnaji, S.Sos., M.Si
- 1.2. Golongan Pangkat dan Jabatan: Penata /III C/132162037/Lektor
- 1.3. Tempat penelitian/alamat : Fisip Unair/Airlangga
- 1.4. Tugas/hubungan kerja : Kepala peneliti
- 1.5. Waktu yang disediakan untuk penelitian ini : 15 jam perminggu

2. Tenaga Peneliti II

- 2.1. Nama Lengkap : Dra. Sutinah.MS
- 2.2. Pangkat dan Jabatan : Penata /IV A /Lektor
- 2.3. Alamat Kerja : Fisip Unair
- 2.4. Tugas/hubungan kerja : Koord. pengolahan data
- 2.5. Waktu yang disediakan untuk penelitian ini : 12 jam per minggu

3. Tenaga Peneliti I

- 3.1. Nama Lengkap : Drs. Sudarso, M.Si
- 3.2. Pangkat dan Jabatan : Penata /III/D/Lektor
- 3.3. Alamat Kerja : Fisip Unair
- 3.4. Tugas/hubungan kerja : Koord.Pengumpulan data
- 3.5. Waktu yang disediakan untuk peneitian ini : 12 jam per minggu

Kuesioner Penelitian
POLA PEMANFAATAN KREDIT USAHA DI KALANGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
PAGUYUBAN GOTONG ROYONG DI KOTA
SURABAYA

ini adalah tim peneliti dari FISIP Universitas Airlangga. Saat ini kami sedang mengkaji persoalan mekanisme aliran dan pola pemanfaatan Kredit Usaha di kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Paguyuban Gotong Royong Di Surabaya. Kami berharap bapak/ibu bersedia membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi yang kami butuhkan untuk kegiatan penelitian ini.

kesediaan bapak/ibu, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih.

PERTANYAAN	KODING
IDENTITAS RESPONDEN	
Jenis kelamin:	
1. Laki-laki	1 ()
2. Perempuan	
Tingkat pendidikan terakhir responden:	
1. Tidak Sekolah 4. SLTA	2 ()
2. SD 5. Perguruan Tinggi	
3. SLTP	
Status perkawinan:	
1. Belum Kawin 3. Duda/janda	3 ()
2. Sudah Kawin	
Jumlah anak responden:.....orang	4 ()
Bentuk keluarga:	
1. Sambah	
2. Batih	5 ()
Status responden di sektor informal:	
1. Pedagang Pemilik modal 3. Buruh	
2. Pedagang/membantu keluarga	6 ()
Pekerjaan sampingan di luar sektor informal yang ditekuni responden:	
1. Makelar 5. Sopir	
2. Tukang 6. Tukang Ojek	7 ()
3. Buruh Bangunan 7. Lain-lain,.....	
4. Tukang becak	
RIWAYAT DAN MATA PENCAHARIAN YANG DITEKUNI	
Dari mana asal responden?	8 ()
1. Asli Surabaya	
2. Luar Surabaya, Prop. Jatim	
3. P. Jawa	
4. Luar P. Jawa	
Kalau berasal dari luar Surabaya, dari mana asal responden?	9 ()
1. Mojokerto 6. Tuban	
2. Sidoarjo 7. Sampang	
3. Lamongan 8. Bojonegoro	
4. Bangkalan 9. Nganjuk	
5. Jombang 10. Lainnya, sebutkan.....	

Responden merupakan migran sirkuler atau semi permanen:		
1. Sirkuler	10 ()	
2. Semi permanen		
Siapa yang mengajak responden ke Surabaya?		
1. Tidak ada		
2. Orang tua	11 ()	
3. Saudara		
4. Kerabat lainnya		
5. Teman		
Faktor utama apa yang mendorong responden meninggalkan daerah asal menuju Surabaya?		
1. Di desa tidak tersedia lagi lapangan pekerjaan		
2. Walaupun ada, upahnya rendah	12 ()	
3. Lainnya,.....		
Apakah responden tinggal menetap di Surabaya?		
1. Ya		
2. Tidak	13 ()	
Bagi yang menetap, sejak tahun berapa responden menetap di Surabaya?		
Tahun:.....	14 ()	
Apakah pekerjaan responden sama dengan sebelum berada di Surabaya?		
1. Sama		
2. Tidak	15 ()	
Kalau tidak sama, apa pekerjaan responden di daerah asal?		
1. Petani pemilik	4. Tukang batu	7. Lainnya.....
2. Petani penggarap	5. Nelayan	
3. Buruh tani	6. Sopir	
Status pertama kali pekerjaan responden adalah:		
1. Usaha sendiri	3. Ikredit usaha kerabat	
2. Ikredit usaha orang tua	4. Ikredit usaha orang lain	
Siapa yang pertama kali mengajak responden bekerja sebagai PKL?		
1. Ide sendiri	4. Teman	
2. Orang tua	5. Lainnya, sebutkan.....	
3. Kerabat		
Selama di Surabaya apakah responden pernah berganti pekerjaan?		
1. Pernah	19 ()	
2. Tidak		
Kalau pernah, berapa kali responden berganti pekerjaan?		
1. Sekali	4. Empat kali	
2. Dua kali	5. Lebih lima kali	
3. Tiga kali	20 ()	
Apa alasan utama responden berganti pekerjaan?		
1. Penghasilan kurang	4. Tempat jualan tidak boleh lagi di tempati	
2. Tidak ada modal	5. Lainnya, sebutkan.....	
3. Sepi pembeli	21 ()	

Untuk pekerjaan yang sekarang sedang ditekuni, sejak kapan responden memulai? Tahun:.....	22 ()
PROSES PERMOHONAN, PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT USAHA	
Sejak kapan responden mulai mendapat kredit usaha? Tahun:.....	23 ()
Sudah berapa kali responden pernah memperoleh kredit usaha?:..... kali	24 ()
Biasanya kredit usaha yang diterima responden dalam bentuk apa: 1. Uang tunai 2. Natura 3. Kadang uang tunai, kadang natura	25 ()
Jumlah kredit usaha yang responden terima terakhir sebesar:..... Rupiah	26 ()
Apakah jumlah pinjaman kredit usaha itu sesuai dengan permohonan responden: 1. Tidak sesuai 2. Sesuai	27 ()
Pernahkah responden mengalami pemotongan jumlah kredit usaha yang diterima: 1. Sering 2. Jarang 3. Tidak pernah	28 ()
Jika pernah, berapa jumlah potongan yang diterima responden: 1. Jumlah absolut :..... Rupiah 2. Prosentase dari jumlah yang mesti diterima :..... Persen	29 () 30 ()
Bagaimana responden mendapatkan kredit usaha: 1. Usaha sendiri 2. Melalui kelompok 3. Lainnya,.....	31 ()
Bagaimana pendapat responden mengenai prosedur peminjaman kredit usaha: 1. Merepotkan 2. Wajar 3. Mudah	32 ()
Pernahkah responden mengalami keterlambatan penerimaan kredit usaha: 1. Sering 2. Jarang 3. Tidak pernah	33 ()
Apakah keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap hasil produksi responden: 1. Sangat berpengaruh 2. Berpengaruh 3. Sama saja 4. Tidak berpengaruh 5. Sangat tidak berpengaruh	34 ()
Apakah pinjaman kredit usaha yang diterima responden terakhir sesuai dengan kebutuhan atau permintaan yang diajukan: 1. Lebih kecil 2. Sesuai 3. Lebih besar	35 ()

<p>Jika pinjaman kredit usaha yang diterima responden kurang dari jumlah yang dibutuhkan, darimana responden memperoleh kekurangannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpanan sendiri 2. Pinjam ke kerabat 3. Pinjam ke rentenir 4. Menggadaikan barang 5. Menjual barang 6. Pinjam ke toko/kios 	36 ()
<p>Yang menjadi jaminan responden meminjam kredit usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Sertifikat 3. KTP 4. Barang, sebutkan..... 5. Lainnya..... 	37 ()
<p>Menurut pengalaman responden bagaimana peran Ketua kelompok PKL dalam proses peminjaman kredit usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Bisa saja 3. Malah menyulitkan 	38 ()
<p>Cara responden membayar cicilan kredit usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung ke pemerintah kota 2. Melalui ketua kelompok 3. Tidak pernah membayar 	39 ()
<p>Bagaimana sistem pengembalian kredit usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diangsur tiap bulan 2. Diangsur tiga bulan sekali 3. Dibayar setelah panen 4. Semampu si peminjam 5. Lainnya..... 	40 ()
<p>Pernahkah responden menunggak angsuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sering 2. Jarang 3. Tidak pernah 	41 ()
<p>Menurut responden beban bunga angsuran kredit usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringan 2. Wajar 3. Berat 	42 ()
<p>Apakah responden memiliki rencana untuk meminjam lagi kredit usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, memiliki 2. Tidak ada rencana 	43 ()
POLA PEMANFAATAN KREDIT USAHA TANI	
<p>Selama responden pernah menerima KREDIT USAHA, biasanya bagaimana pola pemanfaatannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tujuan pemberian KREDIT USAHA 2. Tidak sesuai dengan tujuan pemberian KREDIT USAHA 	44 ()

Digunakan untuk apa saja kredit usaha yang diterima?	
1. Usaha produktif: sebutkan:.....	45 ()
2. Usaha konsumtif: sebutkan.....	
3. Lainnya.....	
Secara umum bagaimanakah pola pemanfaatan KREDIT USAHA:	
1. Semua untuk kegiatan konsumtif	46 ()
2. Sebagian besar untuk kegiatan konsumtif	
3. Sebagian untuk kegiatan konsumtif, sebagian untuk kegiatan produktif	
4. Sebagian besar untuk kegiatan produktif	
5. Semua untuk kegiatan produktif	
Bagaimana cara responden mengganti paket pinjaman KREDIT USAHA yang terlanjur dipakai untuk keperluan lain:	47 ()
1. Tidak diganti	
2. Diganti seperlunya	
3. Diganti sesuai yang sudah terlanjur dipakai	
Darimana responden memperoleh uang untuk mengganti paket pinjaman KREDIT USAHA yang sudah terlanjur digunakan:	48 ()
1. Menjual barang	
2. Menggadaikan barang	
3. Utang	
4. Mengijonkan	
5. Tabungan sendiri	
6. Lainnya,.....	
Menurut responden seberapa jauh KREDIT USAHA membantu usaha yang ditekuni?:	49 ()
1. Sangat tidak membantu	
2. Tidak membantu	
3. Cukup membantu	
4. Membantu	
5. Sangat membantu	
Setelah dibantu pinjaman KREDIT USAHA, jumlah barang yang dijual responden naik atau turun:	50 ()
1. Malah turun	
2. Sama saja	
3. Naik	
Selain dari KREDIT USAHA, apakah responden memiliki sumber dana pinjaman lain:	51 ()
1. Ya	
2. Tidak	
PEMUTIHAN KREDIT USAHA TANI	
Apakah utang KREDIT USAHA responden termasuk yang diputihkan/dihapus?:	52 ()
1. Ya	
2. Tidak	
Berapa jumlah tunggakan KREDIT USAHA responden yang diputihkan:..... Rupiah	53 ()
Apakah pinjaman KREDIT USAHA responden yang diputihkan, responden sudah pernah mengangsur?	
1. Sudah, Kali 2.. Belum pernah	54 ()

<p>Jika seorang petani hasil panennya bagus, apakah ia layak pinjaman KREDIT USAHA-mya juga diputihkan?</p> <p>1. Layak 2. Tidak layak</p>	55 ()
<p>Apakah responden setuju terhadap pemutihan tunggakan KREDIT USAHA:</p> <p>1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju</p>	56 ()
<p>Jika setuju, apakah alasan responden:</p> <p>1. Dapat meminjam utang lagi 2. Mengurangi beban tanggungan 3. Karena gagal panen 4. Karena situasi krisis ekonomi</p>	57 ()
<p>Jika tidak setuju, alasan responden:</p> <p>1. Mendidik masyarakat tidak disiplin 2. Bagi yang sudah lunas ada perasaan tidak adil 3. Takredit usaha menjadi masalah di belakang hari</p>	58 ()
<p>Apakah ada teman responden yang menggerutu atau menyesal karena sudah terlanjur membayar tunggakan KREDIT USAHA:</p> <p>1. Ada, banyak 2. Ada, sedikit 3. Tidak ada</p>	59 ()
<p>Pada waktu yang akan datang jika ada tunggakan utang, apakah responden berharap utangnya akan diputihkan:</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p>	60 ()
<p>Menurut responden, apakah pemutihan tunggakan utang merupakan suatu hal yang memalukan atau memang sudah sewajarnya:</p> <p>1. Sangat memalukan 2. Memalukan 3. Biasa saja 4. Wajar 5. Sangat wajar</p>	61 ()
<p>Hal-hal lain yang perlu dicatat: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	62 ()

ancara :
 il wawancara : 2005
 :

